

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ayuni, Qurrata, 2024, *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945*, UI Publishing, Jakarta.
- Aries, Dian 2013, *Impeachment Presiden: Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Kotak Buku Jogjakarta, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Strong, C.F, 2021, *Konstitusi Politik Modern*, Nusamedia.
- Haris, Syamsuddin, 2014, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung.
- Johan, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- MD, Moh. Mahfud, 2000, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

MPR RI, Badan Pengkajian MPR RI, 2019, *Penataan Sistem Presidensial*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.

Ranadireksa, Hendarmin, 2015, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokusmedia, Bandung.

Sihombing, Herman, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Penerbit Djambatan.

Sinaga, Parbuntian, 2022, *Eksistensi Menteri Negara dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*, Pustaka Mandiri, Kota Tangerang.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok.

Soemantri, Sri, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Triwulan, Titik, 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Prenadamedia Group, Cimanggis.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya

C. Jurnal

Agus Adhari, 2019, *“Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, Dialogia Iuridica, Vol. 11, No. 1, 2019.

Anggraini, Donald dan Nelly, 2024, *“Kedudukan Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 13, No. 2, 2024.

Arion, Tandi, 2016, *“Kedudukan Menteri koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara”*, Vol. 5, No. 3.

Arion, Tandi, Indarja dan Retno Saraswati, 2016, *“Kedudukan Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara”*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016.

Eka, Imran, Furqan Razak dan Alqadri Nur, 2024, *“Kedudukan dan Hubungan Triumvirat Menteri sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan dalam Sistem*

Ketatanegaraan dan Kementerian Negara Republik Indonesia”, The Juris, Vol. 8, No. 1, 2024.

Hariansyah, Syafri dan Anna Erliyana, 2018, “*Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil, dan Prancis*”, Pakuan Law Review, Vol. 4, No. 2, 2018.

Imran, Ali, 2025, “*Relevansi Peran Kementerian Koordinator dalam Sistem Presidensial: Studi Komparatif dan Rekomendasi Kebijakan untuk Sistem Pemerintahan Indonesia*”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 25, 2025.

Manan, Bagir, 2010, “*Beberapa Persoalan Paradigma Setelah Atau Akibat Perubahan UUD 1945*”, Jurnal Konstitusi PSKN HTN FH Unpad, Vol. 2, No. 2, Bandung, 2010.

Rahman, Abdul, Et. Al., 2024, “*Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi-presidensial*”, Journal of Governance dan Local Politics, Vol. 6, No. 1, 2024.

Ramadhan, Febriansyah, 2019, “*Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Masa Pergantian Presiden dan Wakil Presiden Bersamaan*”, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi Badan Pengkajian MPR RI, Edisi 12, 2019.

Rifai, Muhammad, Et. Al, 2025, “*Menakar Konsistensi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementerian Negara dari Perspektif Hukum Administrasi Negara: Telaah Program Food Estate dan Penanganan Covid 19 pada periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo*”, Lex Renaissance, Vol. 10, No. 1.

Sudirman, 2023, “*Single Executive in The Indonesian Residential System*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 11, Issue. 1, 2023.

Triwulan, Titik, 2020, *“Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.”* Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 10, No. 2, 2020.

Yanto, Andri dan Harry Setya, 2021, *“Redesain Pengisian Jabatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia”* Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2, 2021.

D. Artikel

Budiarti Utami, “Hak Veto Menko, Pengamat: Baiknya Jokowi Bikin Perpres”, <https://www.tempo.co/politik/hak-veto-menko-pengamat-baiknya-jokowi-bikin-perpres-691194>, dikunjungi pada 21 Juli 2025.

Humas Kemenko Polkam RI, “Kemenko Polkam Koordinasikan Pemulangan WNI dari Iran”, <https://polkam.go.id/kemenko-polkam-koordinasikan-pemulangan-wni-dari-iran/>, dikunjungi pada 21 Juli 2025.

Kurniawan Fadilah, “Menko Budi Gunawan Gelar Rakor Tingkat Menteri, Mendagri-Kapolri Hadir”, <https://news.detik.com/berita/d-7620971/menko-budi-gunawan-gelar-rakor-tingkat-menteri-mendagri-kapolri-hadir>, dikunjungi pada 21 Juli 2025.

Mahatma Chryshna, “Wakil Menteri, Menteri Muda, dan Menteri Negara dalam Kabinet di Indonesia”, <https://www.kompas.id/artikel/wakil-menteri-menteri-muda-dan-menteri-negara-dalam-kabinet-di-indonesia>, dikunjungi pada 8 Agustus 2025.

Nur Azizah Rizki, “Pakar Hukum Sarankan Jokowi Kaji Efektivitas Menko-Uji Kelayakan Menteri”, <https://news.detik.com/berita/d-4693076/pakar-hukum->

sarankan-jokowi-kaji-efektivitas-menko-uji-kelayakan-menteri, dikunjungi pada 3 Juli 2025.

Sekretariat Kabinet RI, “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Kabinet Kerja IV | Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,” <https://setkab.go.id/kabinet-kerja-iv/>, dikunjungi pada 03 Juli 2025.

Online Etymology Dictionary,
https://www.etymonline.com/word/triumvirate?utm_source=chatgpt.com,
dikunjungi pada tanggal 13 Oktober 2025, Jam 04.20.

Wasson, Donald. “First Triumvirate”,
https://www.worldhistory.org/First_Triumvirate/?utm_source=chatgpt.com,
dikunjungi pada tanggal 13 Oktober 2025, Jam 04.10.

